

ABSTRAK

Syahrul Muharom ,1213050183,2025, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kota Bandung.

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Bandung menjadi isu strategis yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan pemakaiannya berpotensi menimbulkan dampak negatif. Namun demikian, praktik peredaran rokok ilegal masih marak ditemukan, dengan ciri-ciri tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, salah peruntukan, atau bahkan palsu. Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan risiko kesehatan masyarakat akibat produk yang tidak melalui pengawasan standar. Praktik tersebut jelas melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran cukai. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bandung, guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Bandung. (2) Menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana tersebut. (3) Serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan aparat Bea dan Cukai Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan studi dokumen, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Bandung adalah karena tingginya tarif cukai yang mendorong konsumen beralih ke produk ilegal dan rendahnya tingkat pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai masih bersifat represif dan belum didukung oleh pendekatan preventif yang kuat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Namun demikian, terdapat upaya strategis seperti peningkatan sosialisasi, operasi pasar gabungan, serta pengembangan kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Penegakan,Rokok Ilegal,Kota Bandung